

NEGOSIASI KESAKRALAN DALAM PRAKTIK KEAGAMAAN HINDU DI ERA DISRUPSI DIGITAL (SEBUAH KAJIAN BUDAYA)

Negotiation Of Sacredity In Hindu Religious Practices In The Era Of Digital Disruptions (A Cultural Study)

I Gede Parwata^{1*}

Ni Nyoman Perni²

Ida Ayu Adi Armini³

^{*1,2,3}Universitas Hindu
Negeri I Gusti Bagus
Sugriwa Denpasar,
Denpasar, Indonesia

*email:

deparwataa@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital membentuk ulang praktik keagamaan Hindu melalui mediasi media sosial yang memengaruhi representasi ritual, relasi otoritas keagamaan, dan pengalaman religius umat. Artikel ini bertujuan menganalisis proses negosiasi kesakralan dalam praktik keagamaan Hindu di era disrupsi digital melalui perspektif kajian budaya dan mediatization of religion. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif-kritis melalui etnografi digital, wawancara mendalam, dan analisis konten media. Temuan menunjukkan bahwa kesakralan tidak mengalami erosi secara linear, melainkan dinegosiasikan melalui praktik hibrid luring-daring, kurasi representasi ritual, serta adaptasi strategis otoritas keagamaan di ruang digital. Media sosial berfungsi sebagai arena produksi makna religius yang dialogis sekaligus kontestatif, memicu rekonfigurasi legitimasi simbolik dan fragmentasi otoritas. Respons umat memperlihatkan spektrum adaptasi yang dipengaruhi faktor generasional, literasi digital, dan orientasi normatif. Secara teoretis, studi ini menegaskan bahwa kesakralan merupakan konstruksi simbolik yang dinegosiasikan dalam relasi kuasa dan logika media. Secara praktis, temuan ini merekomendasikan penguatan literasi keagamaan digital dan etika representasi ritual untuk menjaga keberlanjutan makna sakral di ruang publik digital.

Kata Kunci:

Digitalisasi Agama
Negosiasi Kesakralan
Hindu
Mediatization Of Religion
Media Sosial
Otoritas Keagamaan

Keywords:

Digitalization Of Religion
Negotiation Of Sacredness
Hinduism
Mediatization Of Religion
Social Media
Religious Authority

Abstract

Digital transformation reshapes Hindu religious practices through social media mediation, affecting ritual representation, religious authority, and believers' religious experience. This article examines the negotiation of sacredness in Hindu practices in the era of digital disruption through cultural studies and the mediatization of religion framework. Employing a qualitative interpretive-critical paradigm, the study draws on digital ethnography, in-depth interviews, and media content analysis. The findings indicate that sacredness does not erode linearly; rather, it is negotiated through offline-online hybrid practices, curated ritual representations, and the strategic adaptation of religious authorities in digital spaces. Social media functions as a dialogical yet contested arena of religious meaning-making, prompting the reconfiguration of symbolic legitimacy and the fragmentation of authority. Believers' responses display a spectrum of adaptations shaped by generational factors, digital literacy, and normative orientations. Theoretically, the study affirms sacredness as a symbolic construction negotiated within power relations and media logics. Practically, it underscores the need to strengthen digital religious literacy and develop ethical guidelines for ritual representation to sustain sacred meanings in digital public spaces.



PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membentuk ulang cara individu dan komunitas berinteraksi dengan pengetahuan, otoritas, dan praktik keagamaan di berbagai tradisi religius, termasuk Hindu. Perkembangan media sosial, platform berbagi video, serta aplikasi pesan instan mendorong terjadinya pergeseran pola transmisi ajaran, ritual, dan simbol-simbol sakral dari ruang-ruang komunal yang terlembagakan menuju ruang publik digital yang cair dan terfragmentasi. Proses ini tidak hanya mengubah medium penyampaian ajaran keagamaan, tetapi juga memengaruhi struktur relasi sosial dan pola otoritas yang selama ini menopang praktik religius dalam komunitas-komunitas keagamaan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa digitalisasi agama memunculkan proses “mediatization of religion” yang mengubah cara agama diproduksi, direpresentasikan, dan dikonsumsi oleh umat (Hjarvard, 2011; Campbell, 2013). Mediatization tersebut menjadikan praktik keagamaan tidak lagi sepenuhnya berada dalam kontrol institusi atau otoritas keagamaan tradisional, melainkan terbuka terhadap intervensi logika media yang menekankan kecepatan sirkulasi informasi, visibilitas publik, dan keterlibatan audiens. Dalam konteks Asia dan Hindu Bali, praktik keagamaan yang sebelumnya berlangsung dalam ruang ritual terbatas kini semakin sering direkam, disiarkan, dan dikomentari di media sosial, sehingga kesakralan ritual berhadapan langsung dengan logika visibilitas, performativitas, dan algoritma (Couldry, 2012; Hoover, 2016). Fenomena ini menandai pergeseran lanskap kultural di mana batas antara sakral dan profan menjadi semakin porous, sekaligus membuka ruang negosiasi makna keagamaan di tengah arus modernitas digital. Dalam situasi tersebut, praktik keagamaan tidak lagi hanya dipahami sebagai ekspresi iman, tetapi juga sebagai representasi kultural yang beroperasi dalam ruang publik yang sarat dengan kepentingan simbolik dan ekonomi perhatian.

Kajian-kajian mutakhir tentang agama dan media menegaskan bahwa digitalisasi tidak sekadar menjadi medium netral, melainkan turut membentuk praktik religius dan relasi otoritas keagamaan (Campbell & Evolvi, 2020; Lövheim, 2021). Media digital berfungsi sebagai lingkungan kultural baru yang membingkai bagaimana simbol, narasi, dan praktik keagamaan dipersepsi serta dinegosiasikan oleh umat. Penelitian-penelitian dalam kajian budaya agama menunjukkan bahwa media digital berperan sebagai arena produksi makna baru melalui representasi simbolik, performativitas identitas religius, serta reartikulasi otoritas tradisional (Hoover, 2016; Hjarvard, 2016). Representasi keagamaan di ruang digital tidak hanya mencerminkan praktik religius yang ada, tetapi juga berpotensi membentuk ulang pemaknaan terhadap yang sakral melalui mekanisme visualisasi, estetisasi, dan simplifikasi simbolik. Dalam studi tentang Hindu kontemporer, sejumlah peneliti mengamati adanya pergeseran dari praktik ritual yang berorientasi pada pengalaman kolektif menuju praktik yang lebih terfragmentasi dan terpersonalisasi, seiring dengan meningkatnya konsumsi konten keagamaan digital (Rao, 2019; Jacobsen, 2020). Di Bali, misalnya, ritual-ritual yadnya, upacara odalan, dan praktik pemujaan personal kian sering direpresentasikan sebagai konten visual di media sosial, yang berpotensi menggeser orientasi pengalaman religius dari dimensi transenden menuju dimensi performatif dan estetis (Putra, 2021; Picard, 2019). Representasi semacam ini kerap menempatkan ritual sebagai objek tontonan publik yang dinilai berdasarkan daya tarik visual, bukan semata-mata kedalaman makna spiritualnya. Kondisi ini menegaskan urgensi kajian yang lebih kritis terhadap bagaimana

kesakralan dinegosiasikan dalam konteks budaya digital yang sarat dengan logika representasi dan konsumsi simbolik.

Meskipun literatur mengakui bahwa digitalisasi membuka peluang baru bagi perluasan akses pengetahuan keagamaan dan penguatan jejaring komunitas religius (Campbell, 2013; Lövheim, 2021), terdapat persoalan mendasar terkait bagaimana praktik keagamaan Hindu mempertahankan atau meredefinisi kesakralannya di tengah logika media yang menekankan visibilitas, kecepatan, dan komodifikasi perhatian. Akses yang lebih luas terhadap konten keagamaan memang dapat memperluas literasi religius umat, namun pada saat yang sama berpotensi mendorong banalitas simbolik ketika ritual dan simbol sakral direduksi menjadi objek konsumsi visual yang terlepas dari konteks teologis dan etisnya. Kesakralan, yang dalam perspektif antropologi agama dipahami sebagai konstruksi simbolik yang dibedakan dari ranah profan (Durkheim, 1912/2001), berpotensi mengalami pergeseran makna ketika simbol dan ritual sakral direpresentasikan dalam ruang digital yang terbuka bagi interpretasi bebas dan konsumsi massal. Sejumlah studi mencatat munculnya ketegangan antara tuntutan menjaga etika ritual dan kecenderungan untuk menampilkan ritual sebagai konten publik yang rentan terhadap simplifikasi makna (Couldry, 2012; Hoover, 2016). Dalam konteks Hindu, persoalan ini diperumit oleh kompleksitas struktur otoritas keagamaan yang melibatkan pemangku, sulinggih, lembaga adat, serta komunitas umat, yang masing-masing memiliki posisi dan kepentingan berbeda dalam merespons mediasi digital praktik keagamaan (Geertz, 1973; Picard, 2019). Ketegangan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekadar persoalan teknologis, melainkan juga persoalan kultural dan teologis yang menyentuh jantung pemaknaan terhadap yang sakral.

Masalah penelitian utama dalam studi ini terletak pada bagaimana proses negosiasi kesakralan berlangsung dalam praktik keagamaan Hindu di era disrupsi digital, khususnya dalam relasi antara representasi ritual di ruang media, otoritas keagamaan tradisional, dan pengalaman religius umat. Negosiasi ini mencakup proses penafsiran ulang terhadap batas-batas yang sakral dan profan, serta penyesuaian norma ritual terhadap tuntutan visibilitas publik di ruang digital. Negosiasi ini tidak dapat dipahami semata sebagai proses degradasi kesakralan, melainkan sebagai arena kontestasi makna yang melibatkan berbagai aktor sosial dengan kepentingan simbolik dan kultural yang berbeda (Bourdieu, 1991). Literatur tentang kajian budaya menekankan bahwa makna simbolik selalu diproduksi melalui praktik diskursif dalam konteks relasi kuasa tertentu (Hall, 1997). Dalam kerangka ini, praktik keagamaan Hindu di ruang digital dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara aktor-aktor religius, institusi adat, produsen konten, serta audiens digital yang masing-masing membawa perspektif dan kepentingan berbeda. Dengan demikian, respons terhadap disrupsi digital dalam praktik keagamaan Hindu perlu dianalisis sebagai proses dialektis antara upaya mempertahankan norma kesakralan dan adaptasi terhadap logika media digital yang menuntut keterbukaan, visibilitas, serta keterlibatan audiens yang lebih luas. Analisis semacam ini memungkinkan pemahaman yang lebih nuansial terhadap perubahan praktik religius di era digital tanpa terjebak pada dikotomi simplistik antara “pelestarian” dan “kemerosotan” kesakralan.

Sejumlah pendekatan umum yang ditawarkan dalam literatur untuk merespons tantangan digitalisasi agama mencakup penguatan literasi digital religius, revitalisasi otoritas keagamaan dalam ruang daring, serta

pengembangan etika representasi ritual di media (Campbell, 2013; Campbell & Evolvi, 2020). Literasi digital religius dipahami sebagai kemampuan umat dan pemuka agama untuk memahami implikasi kultural dan etis dari penggunaan media digital dalam praktik keagamaan, termasuk kesadaran akan potensi komodifikasi dan distorsi makna simbolik (Lövheim, 2021). Pendekatan ini menekankan pentingnya kapasitas reflektif dalam memproduksi dan mengonsumsi konten keagamaan digital, sehingga umat tidak sekadar menjadi konsumen pasif dari representasi simbolik yang disederhanakan. Revitalisasi otoritas keagamaan dalam ruang daring menekankan pentingnya kehadiran aktor-aktor otoritatif untuk memberikan rujukan interpretatif yang kredibel, sehingga praktik keagamaan tidak sepenuhnya terlepas dari kerangka normatif tradisi (Hoover, 2016). Kehadiran otoritas ini juga berfungsi sebagai mekanisme moderasi simbolik terhadap representasi ritual yang berpotensi menyimpang dari etika keagamaan. Selain itu, pengembangan etika representasi ritual bertujuan untuk menjaga batas antara keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap dimensi sakral yang rentan terhadap banalitas visual di ruang publik digital (Couldry, 2012). Etika representasi ini penting untuk mencegah reduksi makna ritual menjadi sekadar komoditas visual yang kehilangan kedalaman spiritualnya.

Lebih spesifik, beberapa studi empiris menunjukkan bahwa adaptasi praktik keagamaan terhadap media digital dapat dilakukan melalui mekanisme kurasi konten ritual, penetapan protokol representasi visual, serta penguatan peran lembaga adat atau keagamaan dalam mengatur publikasi konten sakral (Picard, 2019; Putra, 2021). Kurasi konten memungkinkan komunitas keagamaan untuk memilih bentuk representasi yang dianggap sesuai dengan norma kesakralan lokal, sekaligus menghindari publikasi aspek-aspek ritual yang dianggap terlalu privat atau sensitif. Rao (2019) menunjukkan bahwa komunitas Hindu di India mengembangkan praktik kuratorial dalam membagikan konten ritual daring untuk menjaga kesesuaian dengan norma kesakralan lokal, sementara Jacobsen (2020) mencatat adanya upaya pemuka agama dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi spiritual tanpa mengorbankan kedalaman makna ritual. Dalam konteks Bali, penelitian-penelitian mutakhir mengindikasikan adanya peran lembaga adat dalam menegosiasikan batas-batas representasi ritual di media sosial, meskipun implementasinya sering kali bersifat situasional dan belum terlembagakan secara sistematis (Picard, 2019; Putra, 2021). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa solusi terhadap tantangan digitalisasi tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada konfigurasi aktor, norma lokal, dan dinamika budaya setempat. Oleh karena itu, pemahaman kontekstual menjadi krusial dalam merumuskan strategi adaptasi yang sensitif terhadap nilai-nilai kesakralan lokal.

Meskipun literatur telah memberikan kerangka konseptual dan contoh praktik adaptasi, masih terdapat keterbatasan dalam memahami negosiasi kesakralan sebagai proses kultural yang dinamis dan kontekstual dalam praktik keagamaan Hindu di era disrupsi digital. Sebagian besar studi agama dan media cenderung berfokus pada tradisi Kristen atau Islam di Barat, sementara kajian tentang Hindu, khususnya dalam konteks Bali dan Indonesia, masih relatif terbatas dan fragmentaris (Campbell & Evolvi, 2020; Lövheim, 2021). Selain itu, penelitian yang ada lebih banyak menyoroti aspek representasi media atau literasi digital secara terpisah, belum secara integratif mengkaji bagaimana aktor-aktor keagamaan, struktur otoritas, dan praktik ritual

saling berinteraksi dalam proses negosiasi kesakralan. Keterbatasan ini menyisakan ruang bagi penelitian yang mengaitkan dimensi representasi simbolik dengan dinamika otoritas dan pengalaman religius umat secara simultan. Kesenjangan ini menandai perlunya pendekatan kajian budaya yang mampu membaca praktik keagamaan sebagai arena produksi makna yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, mediasi teknologi, dan dinamika identitas religius (Hall, 1997; Bourdieu, 1991). Pendekatan semacam ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap perubahan praktik religius dalam konteks budaya digital yang kompleks.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana negosiasi kesakralan berlangsung dalam praktik keagamaan Hindu di era disrupsi digital melalui perspektif kajian budaya. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis representasi media, relasi otoritas keagamaan, dan pengalaman religius umat dalam satu kerangka konseptual yang memandang digitalisasi sebagai arena kontestasi makna simbolik. Dengan memadukan kerangka *mediatization of religion* (Hjarvard, 2011), kajian budaya tentang produksi makna (Hall, 1997), dan teori praktik simbolik (Bourdieu, 1991), studi ini mengajukan justifikasi teoretis bahwa kesakralan dalam praktik keagamaan Hindu tidak mengalami erosi secara linear, melainkan dinegosiasikan melalui interaksi antara aktor-aktor religius, norma budaya lokal, dan logika media digital. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian budaya Hindu sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi diskursus agama dan media di konteks non-Barat. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis praktik keagamaan Hindu dalam konteks Indonesia, dengan fokus pada representasi ritual di media digital, dinamika otoritas keagamaan, serta implikasinya terhadap pengalaman religius umat dalam lanskap budaya kontemporer.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif-kritis untuk memahami proses negosiasi kesakralan dalam praktik keagamaan Hindu di era disrupsi digital sebagai fenomena kultural yang sarat makna simbolik dan relasi kuasa. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menangkap kompleksitas pengalaman religius, praktik ritual, serta konstruksi makna yang tidak dapat direduksi ke dalam variabel-variabel kuantitatif semata (Creswell, 2014). Paradigma interpretatif-kritis digunakan untuk membaca praktik keagamaan tidak hanya sebagai ekspresi keyakinan, tetapi juga sebagai praktik kultural yang dinegosiasikan dalam konteks mediasi teknologi, struktur otoritas keagamaan, dan dinamika kekuasaan simbolik (Denzin & Lincoln, 2018; Hall, 1997).

Desain penelitian mengadopsi model studi kualitatif berbasis kajian budaya dengan strategi multi-sumber data (*multiple data sources*) guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi digital (*digital ethnography*), wawancara mendalam semi-terstruktur, dan analisis dokumen/media. Observasi digital dilakukan dengan mengamati representasi praktik keagamaan Hindu di berbagai platform media sosial (seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok) yang menampilkan konten ritual, ceramah keagamaan, atau dokumentasi upacara yadnya dalam kurun waktu tertentu. Pendekatan etnografi digital memungkinkan

peneliti menelaah praktik religius sebagaimana dimediasi oleh teknologi serta interaksi simbolik yang terjadi di ruang daring (Pink et al., 2016; Kozinets, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pola Negosiasi Kesakralan dalam Ritual di Era Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik keagamaan Hindu di lokasi penelitian mengalami proses negosiasi kesakralan yang kompleks sebagai respons terhadap penetrasi teknologi digital dalam kehidupan religius umat. Negosiasi kesakralan dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai pengaburan nilai-nilai sakral secara mutlak, melainkan sebagai proses adaptasi simbolik dan praktis dalam mempertahankan kontinuitas makna religius di tengah perubahan medium praktik keagamaan. Temuan ini sejalan dengan tesis *mediatization of religion* yang menekankan bahwa agama tidak terlepas dari logika media, tetapi membentuk relasi timbal balik dengan medium komunikasi yang dominan dalam masyarakat kontemporer (Hjarvard, 2011; Hepp, 2013).

Observasi lapangan menunjukkan bahwa ritual-ritual utama di pura tetap dipertahankan secara luring sebagai inti pengalaman sakral, terutama pada upacara yadnya yang melibatkan tahapan ritual formal, mantra, dan tata cara adat yang mengikat. Namun, di saat yang sama, praktik dokumentasi ritual melalui gawai pribadi serta distribusi konten ritual di platform digital menjadi bagian dari pengalaman keagamaan umat. Fenomena ini memperlihatkan bentuk negosiasi antara kebutuhan mempertahankan kesakralan ruang dan waktu ritual dengan dorongan partisipasi digital yang berfungsi sebagai sarana ekspresi religius sekaligus representasi identitas spiritual di ruang publik virtual. Temuan ini menguatkan argumen Campbell (2013) bahwa praktik keagamaan di ruang digital tidak sepenuhnya menggantikan ritus luring, tetapi membentuk pola hibrid yang memadukan dimensi sakral dan profan dalam satu ekosistem praktik religius.

Negosiasi kesakralan juga tampak pada perubahan persepsi tentang kehadiran sakral. Bagi sebagian umat, partisipasi daring dalam ritual tertentu, seperti mengikuti siaran langsung upacara besar, dipersepsikan sebagai bentuk keterhubungan spiritual yang bersifat komplementer, bukan substitutif. Temuan ini mengonfirmasi temuan Hoover (2016) bahwa media digital memungkinkan terbentuknya “ruang religius mediatif” yang memperluas jangkauan pengalaman spiritual tanpa menghapus pentingnya kehadiran fisik dalam ritus sakral. Namun demikian, terdapat ketegangan interpretatif di kalangan pemangku dan tokoh adat yang memandang bahwa kesakralan ritual tetap menuntut kehadiran tubuh secara langsung sebagai syarat etis dan teologis. Ketegangan ini mencerminkan proses negosiasi normatif antara otoritas tradisional dan praktik keagamaan kontemporer yang dimediasi teknologi.

Peran Media Sosial dalam Transformasi Praktik Keagamaan

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa media sosial berfungsi sebagai arena utama transformasi praktik keagamaan Hindu di era disrupsi digital. Media sosial tidak hanya menjadi medium komunikasi, tetapi juga berperan sebagai ruang produksi makna religius, pembentukan identitas spiritual, dan arena performativitas kesalehan publik. Transformasi ini sejalan dengan konsep *networked religion* yang

menekankan bahwa praktik keagamaan kontemporer berlangsung dalam jejaring digital yang membentuk ulang relasi otoritas, komunitas, dan ekspresi iman (Campbell, 2013).

Dokumentasi lapangan memperlihatkan bahwa konten keagamaan yang diunggah ke media sosial sering kali mengalami proses kurasi estetika, termasuk penyesuaian visual, narasi singkat, dan penggunaan simbol-simbol religius yang mudah dikenali. Praktik ini berimplikasi pada terjadinya simplifikasi makna ritual yang kompleks menjadi representasi visual yang komunikatif di ruang digital. Temuan ini sejalan dengan analisis Couldry dan Hepp (2017) tentang deep mediatization, di mana logika media mempengaruhi cara praktik sosial direpresentasikan dan dipersepsi. Transformasi tersebut tidak selalu berdampak negatif terhadap pemaknaan sakral, tetapi menggeser pola transmisi nilai dari yang berbasis pengalaman ritual langsung menuju pengalaman simbolik yang tereduksi secara visual dan naratif.

Media sosial juga berperan sebagai ruang edukasi keagamaan informal, terutama bagi generasi muda yang lebih intens berinteraksi dengan platform digital. Konten edukatif tentang makna upacara, simbol ritual, dan nilai-nilai etika Hindu menjadi sarana literasi religius yang melampaui ruang institusional formal. Temuan ini menguatkan argumen Pargament (2013) bahwa spiritualitas kontemporer bersifat dinamis dan kontekstual, di mana individu memanfaatkan sumber-sumber simbolik baru untuk membangun makna religius dalam kehidupan sehari-hari. Namun, literasi religius berbasis media sosial cenderung fragmentaris dan selektif, sehingga berpotensi menghasilkan pemahaman parsial terhadap kompleksitas teologi dan praktik ritual Hindu.

Otoritas Keagamaan, Legitimasi, dan Kontestasi Makna Sakral

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya pergeseran pola otoritas keagamaan dalam praktik Hindu kontemporer yang dimediasi teknologi digital. Otoritas tradisional yang melekat pada pemangku, sulinggih, dan tokoh adat tetap diakui secara normatif dalam konteks ritual formal di pura. Namun, di ruang digital, otoritas keagamaan mengalami fragmentasi dan kontestasi melalui kehadiran figur-figur religius populer yang memperoleh legitimasi dari visibilitas media sosial dan jumlah pengikut daring. Fenomena ini sejalan dengan temuan Hoover (2016) bahwa otoritas religius di era media tidak lagi semata-mata ditentukan oleh struktur institusional, tetapi juga oleh kredibilitas performatif di ruang publik mediatif.

Kontestasi makna sakral muncul ketika interpretasi simbol dan praktik ritual diproduksi oleh aktor-aktor non-otoritatif secara institusional, tetapi memiliki daya pengaruh tinggi di ruang digital. Kondisi ini memunculkan ambiguitas legitimasi pengetahuan religius, di mana umat cenderung mengonsumsi narasi keagamaan yang resonan secara emosional dan visual, meskipun tidak selalu selaras dengan otoritas tradisi. Temuan ini menguatkan analisis Hjarvard (2011) tentang logika media yang berpotensi menggeser otoritas simbolik agama dari institusi menuju aktor-aktor mediatif.

Di sisi lain, sebagian pemangku dan tokoh adat mulai memanfaatkan media digital sebagai sarana perluasan otoritas pedagogis melalui penyebaran penjelasan ritual, ceramah singkat, dan klarifikasi makna teologis. Praktik ini menunjukkan adanya adaptasi strategis otoritas tradisional terhadap ekologi media digital, sebagaimana diprediksi oleh Campbell (2013) bahwa komunitas religius tidak bersifat pasif terhadap teknologi, melainkan melakukan proses apropriasi selektif untuk mempertahankan legitimasi normatifnya.

Respons Umat terhadap Digitalisasi Ritual

Respons umat terhadap digitalisasi ritual menunjukkan spektrum sikap yang beragam, mulai dari penerimaan pragmatis hingga resistensi normatif. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa generasi muda cenderung memaknai digitalisasi sebagai sarana mempermudah akses informasi keagamaan dan memperluas partisipasi simbolik dalam praktik religius. Sikap ini sejalan dengan karakteristik generasi digital native yang mengonstruksi pengalaman religius melalui jejaring komunikasi digital sebagai bagian integral dari kehidupan sosialnya (Hepp, 2013; Couldry & Hepp, 2017).

Sebaliknya, sebagian umat dewasa dan tokoh adat mengekspresikan kekhawatiran terhadap potensi banalitas kesakralan akibat eksposur ritual di ruang publik digital. Kekhawatiran ini berkaitan dengan risiko reduksi makna sakral menjadi konten konsumsi visual yang terlepas dari konteks etis dan teologisnya. Temuan ini mengonfirmasi argumen Hjarvard (2011) tentang potensi desakralisasi simbol agama ketika tunduk pada logika media populer. Meskipun demikian, resistensi tersebut tidak bersifat absolut, melainkan diiringi upaya pengaturan etika digital dalam konteks ritual, seperti pembatasan pengambilan gambar pada momen tertentu yang dianggap paling sakral.

Secara keseluruhan, respons umat memperlihatkan bahwa digitalisasi ritual dipahami sebagai realitas sosial yang tidak terelakkan, sehingga strategi adaptasi etis dan normatif menjadi lebih dominan dibandingkan penolakan total. Temuan ini menguatkan kerangka mediatization of religion yang memandang perubahan praktik keagamaan sebagai proses negosiasi berkelanjutan antara nilai sakral dan logika teknologi (Hepp, 2013; Campbell, 2013).

Pola Negosiasi Kesakralan dalam Ritual di Era Digital

Pembahasan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa negosiasi kesakralan dalam praktik keagamaan Hindu di era disrupsi digital berlangsung sebagai proses dialektis antara pelestarian norma ritual dan adaptasi terhadap logika mediatif. Kesakralan tidak mengalami reduksi makna secara linear akibat digitalisasi, melainkan direkonstruksi melalui praktik simbolik yang kontekstual dan reflektif. Temuan ini sejalan dengan kerangka mediatization of religion yang menempatkan media sebagai aktor kultural yang turut membentuk struktur makna religius, bukan sekadar saluran netral (Hjarvard, 2011; Hjarvard, 2016). Dalam konteks Hindu Indonesia, representasi ritual di ruang digital memperluas jangkauan pengalaman religius tanpa sepenuhnya meniadakan dimensi embodied religiosity yang melekat pada praktik luring, sebagaimana ditegaskan oleh Hoover (2016) mengenai sifat mediatif pengalaman religius kontemporer.

Pembacaan ini memperkaya pemahaman antropologi agama klasik tentang batas sakral-profan yang bersifat dikotomis sebagaimana dirumuskan oleh Durkheim (1912/2001), dengan menunjukkan bahwa dalam konteks digital batas tersebut bersifat porus dan dinegosiasikan secara situasional melalui praktik diskursif komunitas. Kesakralan ritual tidak lagi semata ditentukan oleh eksklusivitas ruang dan waktu, tetapi juga oleh etika representasi yang disepakati secara sosial. Dalam perspektif kajian budaya, makna sakral diproduksi melalui proses representasi yang selalu terbuka terhadap artikulasi ulang (Hall, 1997). Dengan demikian, praktik dokumentasi ritual atau partisipasi daring dapat dipahami sebagai strategi artikulasi

identitas religius yang merefleksikan upaya komunitas untuk mempertahankan kontinuitas simbolik di tengah perubahan ekologi media.

Secara teoretik, temuan ini mengonfirmasi tesis *networked religion* yang menekankan bahwa praktik keagamaan kontemporer beroperasi dalam jejaring relasi luring-daring yang membentuk pengalaman spiritual umat secara hibrid (Campbell, 2013). Negosiasi kesakralan dalam jejaring ini menunjukkan bahwa umat dan otoritas keagamaan memiliki kapasitas reflektif untuk memediasi penggunaan teknologi tanpa sepenuhnya mengorbankan norma sakral. Dinamika ini mengindikasikan bahwa digitalisasi bukan sekadar tekanan eksternal terhadap tradisi, melainkan medan interaksi di mana makna sakral direproduksi melalui adaptasi simbolik yang berlapis.

Peran Media Sosial dalam Transformasi Praktik Keagamaan

Pembahasan mengenai peran media sosial menunjukkan bahwa platform digital membentuk ulang logika produksi dan konsumsi praktik keagamaan Hindu melalui mekanisme visibilitas, performativitas, dan sirkulasi simbolik yang cepat. Temuan ini konsisten dengan argumen Couldry dan Hepp (2017) tentang *deep mediatization*, di mana praktik sosial semakin terintegrasi dengan infrastruktur media digital. Representasi ritual dalam format visual singkat di media sosial cenderung menekankan aspek estetis dan performatif, yang berpotensi menggeser orientasi praksis religius dari pengalaman reflektif menuju konsumsi simbolik yang lebih permukaan. Namun, temuan ini juga memperlihatkan bahwa media sosial berfungsi sebagai medium perluasan akses terhadap pengetahuan keagamaan, sejalan dengan pandangan Campbell dan Evolvi (2020) mengenai potensi ruang digital sebagai arena literasi religius partisipatoris.

Pembacaan kritis terhadap transformasi ini menegaskan ambivalensi peran media sosial dalam praksis keagamaan. Di satu sisi, media sosial membuka ruang bagi pembelajaran dan jejaring komunitas lintas ruang, sebagaimana diamati oleh Rao (2019) dalam konteks praktik Hindu kontemporer. Di sisi lain, fragmentasi konten keagamaan berpotensi melemahkan pemahaman holistik terhadap makna ritual, sebagaimana diperingatkan oleh Hoover (2016) tentang banalitas simbol religius dalam ruang publik mediatif. Dalam kerangka kajian budaya, representasi ritual di media sosial merupakan praktik produksi makna yang sarat dengan relasi kuasa dan kepentingan simbolik (Hall, 1997), sehingga transformasi praktik keagamaan tidak dapat dipahami semata sebagai efek teknologi, melainkan sebagai hasil interaksi antara logika media, strategi aktor religius, dan dinamika identitas umat.

Implikasi teoretik dari temuan ini terletak pada perlunya membaca media sosial sebagai arena negosiasi makna religius yang bersifat dialogis dan kontestatif. Transformasi praktik keagamaan melalui media sosial menandai pergeseran dari otoritas tunggal menuju pluralitas interpretasi, yang pada gilirannya menuntut penguatan literasi keagamaan digital sebagai prasyarat bagi pemaknaan simbolik yang lebih reflektif.

Otoritas Keagamaan, Legitimasi, dan Kontestasi Makna Sakral

Pembahasan atas rekonfigurasi otoritas keagamaan menunjukkan bahwa digitalisasi memicu pergeseran relasi kuasa simbolik dalam praktik keagamaan Hindu. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Bourdieu (1991) tentang produksi makna simbolik yang terikat pada distribusi modal kultural dan simbolik. Dalam ruang digital, modal simbolik tidak hanya ditentukan oleh posisi struktural dalam institusi

keagamaan, tetapi juga oleh kemampuan aktor dalam membangun visibilitas dan kredibilitas performatif di media sosial. Fenomena ini mengonfirmasi analisis Hoover (2016) tentang munculnya figur-figur religius baru yang memperoleh legitimasi melalui resonansi narasi di ruang mediatif.

Meskipun demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa otoritas tradisional tidak sepenuhnya terpinggirkan, melainkan mengalami adaptasi strategis melalui apropriasi media digital sebagai sarana edukasi dan legitimasi. Temuan ini mendukung argumen Campbell (2013) bahwa komunitas religius memiliki kapasitas reflektif untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik keagamaannya tanpa kehilangan kerangka normatif inti. Kontestasi makna sakral di ruang digital dapat dipahami sebagai fase transisional dalam rekonfigurasi otoritas religius, di mana legitimasi normatif dan legitimasi mediatif berinteraksi secara dinamis. Dalam kerangka mediatization of religion, pergeseran ini mencerminkan transformasi otoritas simbolik agama di bawah pengaruh logika media yang menekankan visibilitas dan afektivitas (Hjarvard, 2011; Hjarvard, 2016).

Pembacaan ini memperluas pemahaman tentang otoritas keagamaan Hindu kontemporer sebagai ekologi hibrid yang memadukan struktur tradisional dengan dinamika mediatif. Proses ini menandai terbentuknya arena produksi makna sakral yang lebih plural dan kontestatif, namun tetap berakar pada norma-norma tradisi.

Respons Umat terhadap Digitalisasi Ritual

Pembahasan respons umat terhadap digitalisasi ritual menunjukkan adanya spektrum adaptasi yang dipengaruhi oleh faktor generasional, orientasi nilai, dan kedekatan dengan struktur otoritas keagamaan. Temuan ini sejalan dengan analisis Lövheim (2021) mengenai personalisasi religiositas di ruang digital, di mana praktik keagamaan cenderung dipraktikkan secara lebih fleksibel dan situasional. Generasi muda menunjukkan kecenderungan mengintegrasikan praktik religius dengan logika media digital sebagai bagian dari identitas keseharian, sementara sebagian umat dewasa mengekspresikan kekhawatiran normatif terkait potensi reduksi kesakralan. Ambivalensi ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan adaptasi dan upaya preservasi norma sakral, sebagaimana diidentifikasi oleh Couldry (2012) dalam kajian etika representasi simbolik di media.

Pembahasan ini juga mengonfirmasi pandangan Pargament (2013) tentang coping spiritual yang adaptif, di mana individu dan komunitas memanfaatkan sumber-sumber simbolik baru untuk mempertahankan relevansi pengalaman religius di tengah perubahan kultural yang cepat. Digitalisasi ritual, dalam konteks ini, tidak semata dipahami sebagai ancaman normatif, tetapi juga sebagai peluang untuk reartikulasi makna spiritual yang lebih kontekstual bagi generasi kontemporer. Integrasi temuan empirik dengan kerangka teoretik menunjukkan bahwa respons umat terhadap digitalisasi ritual merupakan bagian dari proses negosiasi identitas religius yang lebih luas dalam lanskap budaya digital.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa negosiasi kesakralan, transformasi praktik keagamaan melalui media sosial, rekonfigurasi otoritas religius, dan respons umat terhadap digitalisasi ritual merupakan dimensi yang saling terhubung dalam membentuk lanskap keberagamaan Hindu di era disrupsi digital. Integrasi temuan empirik dengan kerangka mediatization of religion (Hjarvard, 2011), kajian budaya

tentang produksi makna (Hall, 1997), dan teori praktik simbolik (Bourdieu, 1991) menunjukkan bahwa perubahan praktik keagamaan tidak dapat direduksi sebagai proses linear menuju desakralisasi, melainkan sebagai dinamika adaptasi simbolik yang mempertahankan relevansi agama dalam konteks budaya digital kontemporer.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa praktik keagamaan Hindu di era disrupsi digital tidak mengalami erosi kesakralan secara linear, melainkan berada dalam proses negosiasi makna yang dinamis dan kontekstual. Transformasi digital memediasi ulang cara ritual, simbol, dan otoritas keagamaan diproduksi, direpresentasikan, serta dimaknai oleh umat dalam ruang publik digital. Kesakralan tidak sepenuhnya tergerus oleh logika visibilitas media, tetapi direkonstruksi melalui adaptasi simbolik yang melibatkan aktor-aktor religius, struktur otoritas tradisional, serta komunitas umat. Dengan demikian, digitalisasi praktik keagamaan lebih tepat dipahami sebagai arena kontestasi makna yang memunculkan relasi hibrid antara ruang sakral luring dan ruang mediatif daring, bukan sebagai proses desakralisasi yang bersifat deterministik.

Secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa negosiasi kesakralan berlangsung melalui praktik kuratorial representasi ritual, pembingkai makna simbolik oleh otoritas keagamaan, serta respons umat yang bersifat ambivalen terhadap digitalisasi ritual. Media sosial berfungsi sebagai arena produksi makna religius yang bersifat dialogis sekaligus kontestatif, di mana praktik keagamaan mengalami transformasi dalam format representasi visual dan naratif yang lebih ringkas, performatif, serta terpersonalisasi. Rekonfigurasi otoritas keagamaan dalam ruang digital memperlihatkan bahwa legitimasi simbolik tidak lagi semata ditentukan oleh posisi struktural dalam institusi keagamaan, tetapi juga oleh kredibilitas performatif dan resonansi diskursif di ruang mediatif. Respons umat yang beragam mencerminkan ketegangan antara kebutuhan adaptasi terhadap ekologi media baru dan upaya mempertahankan norma kesakralan tradisi, yang secara kolektif membentuk lanskap keberagamaan Hindu kontemporer.

Dari sisi implikasi teoretis, temuan penelitian ini memperkaya kerangka mediatization of religion dengan memberikan konteks empirik pada praktik keagamaan Hindu di Indonesia sebagai tradisi religius yang memiliki struktur ritual kuat, tetapi tetap adaptif terhadap perubahan ekologi media. Integrasi perspektif kajian budaya tentang produksi makna simbolik dan teori praktik simbolik menunjukkan bahwa kesakralan merupakan konstruksi kultural yang diproduksi melalui relasi kuasa, mediasi teknologi, dan dinamika identitas religius. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan interdisipliner dalam studi agama dan media, khususnya dengan menempatkan digitalisasi sebagai arena kontestasi makna simbolik alih-alih sebagai faktor eksternal yang bersifat deterministik. Temuan ini juga menantang dikotomi klasik sakral-profan dengan menunjukkan bahwa batas tersebut bersifat porus dan dinegosiasikan secara situasional dalam konteks budaya digital.

Implikasi teoretis lainnya terletak pada penguatan konsep otoritas keagamaan sebagai ekologi hibrid yang menggabungkan legitimasi normatif tradisional dengan legitimasi mediatif. Rekonfigurasi ini

memperluas pemahaman tentang relasi kuasa simbolik dalam agama di era digital, dengan menegaskan bahwa otoritas religius tidak semata mengalami delegitimasi, melainkan mengalami reartikulasi melalui strategi apropriasi media dan pembingkaihan diskursif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan konseptual bagi pengembangan model analisis otoritas keagamaan dalam konteks digital yang lebih sensitif terhadap dinamika lokal dan kultural.

Dari sisi implikasi praktis, temuan penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan literasi keagamaan digital yang berorientasi pada penguatan pemahaman etika representasi ritual dan simbol sakral di ruang publik digital. Lembaga keagamaan, pemangku, dan tokoh adat dapat memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi spiritual dengan mengembangkan pedoman kuratorial yang jelas mengenai batas-batas representasi ritual yang layak dipublikasikan, sehingga dimensi kesakralan tetap terjaga dalam proses mediasi. Penguatan kapasitas aktor-aktor keagamaan dalam literasi media juga menjadi krusial untuk memastikan bahwa apropriasi teknologi dilakukan secara reflektif dan bertanggung jawab, bukan sekadar respons pragmatis terhadap tuntutan visibilitas digital.

Implikasi praktis lainnya berkaitan dengan perancangan strategi pendidikan agama Hindu yang lebih kontekstual terhadap realitas budaya digital. Integrasi literasi media ke dalam kurikulum pendidikan agama Hindu dapat memperkuat kemampuan generasi muda dalam memaknai konten keagamaan digital secara kritis, sehingga konsumsi simbol religius tidak tereduksi menjadi pengalaman permukaan yang terfragmentasi. Selain itu, penguatan peran lembaga adat dan komunitas lokal dalam mengelola representasi ritual di media sosial dapat menjadi strategi kolektif untuk menegosiasikan batas antara keterbukaan informasi dan perlindungan dimensi sakral. Pendekatan kolaboratif antara institusi keagamaan, pendidik, dan komunitas digital menjadi kunci dalam membangun ekosistem mediatif yang lebih etis dan berkelanjutan bagi praktik keagamaan Hindu.

Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital praktik keagamaan Hindu perlu dipahami dalam kerangka adaptasi simbolik yang kompleks, di mana kesakralan dinegosiasikan melalui interaksi antara aktor religius, struktur otoritas, dan logika media digital. Implikasi teoretis dan praktis yang dihasilkan membuka ruang bagi pengembangan riset lanjutan yang lebih mendalam mengenai variasi kontekstual negosiasi kesakralan di berbagai komunitas Hindu, serta eksplorasi strategi kelembagaan yang efektif dalam merespons tantangan etika dan kultural dari mediatization of religion di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STKIP Agama Hindu Amlapura atas dukungan kelembagaan, fasilitasi administrasi, serta pendampingan akademik yang diberikan selama perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pengurus dan pengempon Pura Vaikuntha Vyomantara, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa

Yogyakarta, yang telah memberikan izin, dukungan, dan kerja sama yang konstruktif sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan kondusif.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh peserta kegiatan yang telah berpartisipasi secara aktif, terbuka, dan reflektif dalam setiap sesi pengabdian. Kontribusi pemikiran, pengalaman, serta respons kritis dari para peserta menjadi sumber data empiris yang bermakna bagi pengayaan analisis dan pembahasan ilmiah dalam artikel ini. Penghargaan turut disampaikan kepada mahasiswa yang terlibat sebagai tim pelaksana lapangan atas dedikasi, kedisiplinan, dan kerja kolaboratif selama proses kegiatan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para mitra lokal serta pihak-pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan moral dan teknis yang memperkuat keberlanjutan program pengabdian. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan; oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif dari para mitra, reviewer, dan pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan kajian serta pengembangan program pengabdian pada masa mendatang.

REFERENSI

- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Polity Press.
- Campbell, H. A. (2013). *Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds*. Routledge.
- Campbell, H. A., & Evolvi, G. (2020). Contextualizing current digital religion research on emerging technologies. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(1), 5–17. <https://doi.org/10.1002/hbe2.149>
- Couldry, N. (2012). *Media, society, world: Social theory and digital media practice*. Polity Press.
- Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Durkheim, É. (2001). *The elementary forms of religious life* (C. Cosman, Trans.). Oxford University Press. (Original work published 1912)
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. SAGE Publications.
- Hepp, A. (2013). The communicative figurations of mediatized worlds: Mediatization research in times of the 'mediation of everything'. *European Journal of Communication*, 28(6), 615–629. <https://doi.org/10.1177/0267323113501148>
- Hjarvard, S. (2011). The mediatization of religion: Theorising religion, media and social change. *Culture and Religion*, 12(2), 119–135. <https://doi.org/10.1080/14755610.2011.579719>
- Hjarvard, S. (2016). Mediatization and the changing authority of religion. *Media, Culture & Society*, 38(1), 8–17. <https://doi.org/10.1177/0163443715615412>
- Hoover, S. M. (2016). *The media and religious authority*. Penn State University Press.
- Jacobsen, K. A. (2020). Hinduism in the digital age: New forms of religious practice and communication. *Journal of Religion, Media and Digital Culture*, 9(2), 141–158.
- Kozinets, R. V. (2020). *Netnography: The essential guide to qualitative social media research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Lövheim, M. (2021). Mediatization and religion: Transforming the public and private sphere. In H. A. Campbell (Ed.), *Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds* (pp. 47–61). Routledge.
- Pargament, K. I. (2013). *Spiritually integrated psychotherapy: Understanding and addressing the sacred*. Guilford Press.
- Picard, M. (2019). *Bali: Pariwisata budaya dan budaya pariwisata*. Kepustakaan Populer Gramedia.

- Pink, S., Horst, H., Postill, J., Hjorth, L., Lewis, T., & Tacchi, J. (2016). *Digital ethnography: Principles and practice*. SAGE Publications.
- Putra, I. N. D. (2021). Representasi ritual Hindu Bali di media sosial: Antara sakralitas dan estetisasi. *Jurnal Kajian Bali*, 11(2), 245–264.
- Rao, U. (2019). Hinduism online: Rituals, authority, and digital mediation. *Journal of Religion in Asia*, 9(1), 23–45.